

MATRIKS RENCANA AKSI PENINGKATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (D12)
DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS

Instansi: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sasaran: Terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang menghasilkan pengadaan yang efektif, efisien, serta meningkatkan daya saing bangsa

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	TARGET	RENCANA AKSI	INDIKATOR	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
1	1 urgensi penyempurnaan ketentuan tata cara pengadaan badan usaha pelaksana 2 terdapat perbedaan proses dan ketentuan antara pengadaan proyek KPBU Solicited dengan unsolicited 3 masih diperlukan kajian dan koordinasi lebih lanjut dengan Bappenas terkait pengadaan Badan Penyiapan	Mendorong lenkujudnya tata kelola pelaksanaan KPBU yang lebih baik, efektif dan efisien	Tersusunnya revisi Peraturan LKPP tentang cara pengadaan penyediaan infrastruktur melalui KPBU	Revisi Peraturan LKPP tentang tata cara pengadaan penyediaan infrastruktur melalui Kegasama Pemennintah dan Badan Usaha (KPBU)	revisi Peraturan LKPP tentang cara pengadaan penyediaan infrastruktur melalui KPBU	Januari – November	Sub Direktorat Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha	1	Mempelajari dan mengevaluasi implementasi Peraturan LKPP tentang tata cara pengadaan KPBU pada proyek yang telah masuk tahap Transaksi	Januari – Februari	Dokumen Daftar Inventans Masalah
								2	Melakukan diskusi dengan narasumber terkait	Maret – April	Notulensi, daftar hadir, undangan rapat
								3	Merumuskan revisi Peraturan LKPP tentang tata cara pengadaan penyediaan infrastruktur melalui KPBU	Mei - Agustus	Draft Peraturan LKPP tentang tata cara pengadaan penyediaan infrastruktur melalui KPBU
								4	Melakukan rapat harmonisasi draft revisi Peraturan LKPP tentang tata cara pengadaan penyediaan infrastruktur melalui KPBU dengan stakeholder terkait	September	Notulensi, daftar hadir, undangan rapat, draft-draft terkait
								5	Finalisasi dan pengundangan revisi Peraturan LKPP tentang tata cara pengadaan penyediaan infrastruktur	Oktober - November	Revisi Peraturan LKPP tentang tata cara pengadaan penyediaan infrastruktur melalui KPBU
2	Belum selarasnya pengaturan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dengan kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa	Terjadinya keselarasan antara kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dengan kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa	Tersusunnya Peraturan LKPP tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Penyusunan Regulasi terkait Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Tersusunnya Peraturan LKPP tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Januari - Desember	SubDirektorat Badan Usaha dan Keadaan Khusus	1	Pembahasan Draft Peraturan LKPP tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (dengan melibatkan stakeholder Kementerian Dalam Negeri, BPKP dan Akademisi)	Januari - Mei	Notulensi dan Draft Peraturan LKPP tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, undangan rapat, daftar hadir
								2	Uji Publik Draft Peraturan LKPP tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	April	Laporan kegiatan dan Draft Peraturan LKPP tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
								3	Finalisasi dan Pengesahan Peraturan LKPP tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Juni - Juli	Notulensi dan Peraturan LKPP tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, daftar hadir, undangan rapat
								4	Penyusunan Laporan	Desember	Laporan Akhir Kegiatan
3	Belum adanya Standar Pelayanan dan SOP untuk Kegiatan Konsultasi di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus - Standar Pelayanan dan SOP Kegiatan Pendampingan di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus sudah tidak sesuai dengan prosedur kegiatan pendampingan yang dijalankan saat ini	Terwujudnya pelayanan publik yang Efektif dan Efisien oleh Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Tersusunnya Standar Pelayanan dan SOP kegiatan di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Penyusunan Standar Pelayanan dan SOP kegiatan di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Standar Pelayanan dan SOP kegiatan di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Mei - Desember	1 SubDirektorat Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha 2 SubDirektorat Badan Usaha dan Keadaan Khusus	1	Rapat Koordinasi Internal D12 dan BPOT tentang Penyusunan Standar Pelayanan dan SOP kegiatan D12	Mei	Notulensi dan pelayanan D12 yang memerlukan disusun Standar Pelayanan dan SOP, daftar hadir, undangan rapat
								2	Penyusunan Business Process kegiatan di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Mei	Notulensi dan Business Proses kegiatan di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, daftar hadir, undangan rapat

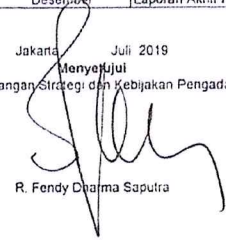
								3	Penyusunan Draft Standar Pelayanan kegiatan di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Mei	Notulensi dan Draft Standar Pelayanan kegiatan di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, daftar hadir, undangan rapat
								4	Penyusunan Draft SOP kegiatan di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Juni - Juli	Draft SOP kegiatan di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus.
								5	Pembahasan Draft Standar Pelayanan dan SOP kegiatan di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Juli - September	Notulensi dan Draft Final Standar Pelayanan dan SOP kegiatan di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
								6	Finalisasi dan Pengesahan Standar Pelayanan dan SOP kegiatan di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	September - Oktober	Standar Pelayanan dan SOP kegiatan di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
								7	Penyusunan Laporan	Desember	Laporan Akhir Kegiatan
4	Belum adanya aplikasi yang memberikan informasi terkait Pengadaan Barang/Jasa di bidang khusus (Non K/L/PPD)	Stakeholder dapat lebih mengetahui dan memahami tentang aturan Pengadaan Barang/Jasa di bidang khusus (Non K/L/PPD)	Terciptanya aplikasi yang memberikan informasi terkait Pengadaan Barang/Jasa di bidang khusus (Non K/L/PPD)	Penyusunan Aplikasi 'SIDAK' yang merupakan Knowledge Management System (KMS) Pengadaan Barang/Jasa di bidang khusus (Non K/L/PPD) {Area Manajemen Perubahan}	Aplikasi 'SIDAK' sebagai Knowledge Management System (KMS) Pengadaan Barang/Jasa di bidang khusus (Non K/L/PPD)	Februari - Desember	SubDirektorat Bacaan Usaha dan Keadaan Khusus	1	Rapat Persiapan dan Perencanaan (Identifikasi Kebutuhan dan Pengumpulan Informasi Awal)	Februari	Notulensi dan Hasil Identifikasi Kebutuhan dan Informasi,daftar hadir, undangan rapat
								2	Analisa Sistem dan Koordinasi dengan BHSIK	Maret - Juni	Notulensi, hasil analisa sistem dan hasil koordinasi dengan BHSIK, daftar hadir, undangan rapat
								3	Perancangan Sistem	Juli-Oktober	Laporan kemajuan kegiatan, dummy "SIDAK"
								4	Implementasi dan sosialisasi ke internal D12	Oktober	Laporan kegiatan
								5	Penyusunan Laporan	Desember	Laporan Akhir Kegiatan

Mengetahui
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan



Salusra Widya

Jakarta, Juli 2019
Menyetujui
Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus



R. Fendy Dharma Saputra